

PENGARUH DANA PERIMBANGAN, PDRB PER KAPITA, TAX EFFORT, DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011-2017)

Noor Fikri Muhammad¹

¹Departemen IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
noorfikri@students.undip.ac.id

Abstract

Since the era of Fiscal Decentralization, the role of Local Revenue in Central Java Province has not been seen. This can be seen from the portion of Local Revenue which is quite small compared to the Balancing Fund in the total regional revenue. This raises the suspicion that the Regional Government will depend on the Balancing Fund. But in this study also looked at the influence of other variables that might be able to influence the acceptance of Local Original Revenues, among others, Per Capita GRDP, Tax Effort, and Population Amount. The purpose of this study was to determine whether the variable Balancing Funds, Per Capita GRDP, Tax Effort, and Population affect the acceptance of Local Original Revenue.

This study uses secondary data with cross section panel data of 35 districts / cities in Central Java and a 7-year time series from 2011-2017. The analytical tool used in estimating this research model is panel data regression using the newey-west method.

The results of this study indicate that the variable Balance Funds, Per Capita GRDP, and Tax Effort. has a positive and significant influence on Local Revenue in the province of Central Java in the period 2011-2017. While the Population has no influence on Local Revenue in the province of Central Java in the period 2011-2017

Keywords: *Local Revenue, Central Government Transfer, Per Capita GRDP, Tax Efforts, Population*

PENDAHULUAN

Dalam berjalannya otonomi daerah di Indonesia, pengelolaan keuangan Jawa Tengah hingga saat ini masih memiliki kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang cukup kecil dibandingkan dengan provinsi lainnya di pulau jawa yaitu hanya sebesar 19,42% dari total Pendapatan Daerah pada tahun 2017. Laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah pun berfluktuasi setiap tahunnya, hal ini mengindikasikan tidak konsistennya kenaikan jumlah pertumbuhan pendapatan asli daerah di provinsi ini.

Di sisi lain, Dana Perimbangan sebagai penyumbang terbesar total pendapatan daerah yang dicurigai mempengaruhi performa penerimaan pendapatan asli daerah juga memiliki laju pertumbuhan yang berfluktuasi setiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2017 dana perimbangan yang diterima turun dari tahun sebelumnya.

Kemampuan ekonomi individu suatu daerah diperkirakan menjadi salah satu faktor penerimaan pendapatan asli daerah. Kemampuan ekonomi ini dapat diukur menggunakan PDRB Per Kapita di daerah tersebut dimana angka laju pertumbuhannya berfluktuatif setiap tahunnya, sejalan dengan laju pertumbuhan pendapatan asli daerah.

Selain itu jumlah penduduk juga merupakan faktor lain dalam penerimaan pendapatan asli daerah sebagai subjek penerimaan pajak daerah. Laju pertumbuhan penduduk di provinsi jawa tengah memiliki tren menurun setiap tahunnya dari 2011-2017, hal ini diperkirakan terjadi akibat suksesnya program pengendalian pertumbuhan penduduk. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Asmuruf (2015), jumlah penduduk memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pendapatan asli daerah.

Dalam mencari penerimaan daerah untuk pendapatan asli daerah salah satunya dapat dilihat dari kondisi daya pajaknya. Daya pajak merupakan aspek relevan bila dikaitkan dengan tujuan otonomi daerah, yaitu peningkatan kemandirian daerah. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi daya pajak suatu daerah maka pendapatan daerah tersebut juga akan semakin tinggi. Di Provinsi Jawa Tengah sendiri daya pajak meningkat setiap tahunnya dari tahun 2011-2017. Hal ini mengindikasikan provinsi jawa tengah sudah berada di jalur yang tepat untuk menuju kemandirian daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Desentralisasi Fiskal

Konsep umum, teori, dan studi empiris terkait desentralisasi fiskal terus berkembang baik di negara-negara maju maupun negara berkembang. Secara umum, menurut Porcelli (2009) diskusi tentang desentralisasi fiskal termasuk dalam bahasan teori besar federalisme fiskal yaitu terbagi atas teori klasik atau *first generation theory of fiscal federalism* dan teori generasi kedua atau *second generation theory of fiscal federalism*.

Perspektif ekonomi sebagai dasar utama teori klasik yaitu terciptanya efisiensi penyediaan barang publik melalui pelaksanaan desentralisasi fiskal. Kontributor teori klasik yaitu Tiebout (1956), Oates (1972), dan Musgrave (1973, dalam Porcelli (2009) menekankan bahwa efisiensi pelayanan publik akan tercipta jika pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebab pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih baik tentang daerah tersebut, sehingga mampu menentukan kebijakan yang sesuai dengan preferensi daerah.

Teori generasi kedua (*second generation theory of fiscal federalism*) yang dikembangkan Oates (2005) membahas tentang desentralisasi fiskal dengan relaxasi terhadap asumsi dasar teori klasik. Pasalnya, teori klasik nyatanya tidak aplikatif karena asumsi-asumsi dasar yang tidak sepenuhnya terjadi. Teori generasi kedua umumnya membahas tentang pilihan publik dan ekonomi politik yang fokus pada proses politik dan perilaku agen politik. Teori generasi kedua mencoba menggunakan model yang memuat tentang kemungkinan adanya pengaruh proses

politik dalam pelaksanaan desentralisasi (Porcelli, 2009). Teori ini berdasar pada asumsi bahwa para pemegang kepentingan atau stakeholder dalam proses politik, baik pemilih maupun agen politik itu sendiri, ingin memaksimalkan tujuan dan preferensinya sendiri.

Intergovernmental Transfer

Intergovernmental transfer atau dana transfer merupakan suatu dana yang ditransfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai sumber penerimaan daerah dalam melaksanakan pemerintahan daerah yang dalam aplikasinya di Indonesia disebut sebagai Dana Perimbangan. Shah (2006) menyatakan bahwa dana perimbangan terdiri atas dua instrumen yaitu transfer non-kondisional/ transfer umum/*unconditional (general) transfer* dan transfer kondisional/transfer selektif/*conditional (selective) transfer*.

Transfer non-kondisional merupakan dana umum yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Menurut Shah (2006) transfer non-kondisional pada dasarnya bersifat “*no strings attached*” yaitu tanpa ketentuan atau batasan tertentu tentang untuk apa dan bagaimana dana tersebut akan digunakan oleh pemerintah daerah.

Berbeda dengan transfer non-kondisional, transfer kondisional adalah dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai insentif untuk penyediaan barang/jasa publik yang sudah ditentukan (spesifik). Umumnya, transfer kondisional digunakan untuk penyediaan barang publik yang dianggap sangat penting oleh pemerintah pusat. Menurut Shah (2006) terdapat 2 tipe transfer kondisional yaitu *Matching Transfer* dan *non-matching Transfer*.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Badan Pusat Statistik, pengertian dari Pendapatan Asli Daerah adalah suatu pendapatan yang didapat oleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang berguna untuk keperluan daerah yang bersangkutan demi membiayai seluruh kegiatannya. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 6 menjelaskan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: Hasil Pajak daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Potensi dari pendapatan asli daerah adalah besarnya kekuatan yang dimiliki suatu daerah dalam menghasilkan sejumlah penerimaan pendapatan. Untuk mengetahui potensi PAD yang dimiliki suatu daerah, maka perlunya analisis mengenai beberapa variabel yang dapat mempengaruhi sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah. variabel tersebut terdiri dari dua jenis yaitu variabel yang dapat dikendalikan (variabel-variabel kebijakan dan kelembagaan) dan variabel yang tidak dapat dikendalikan (variabel-variabel ekonomi). Menurut Halim (2007) variabel-variabel yang harus dianalisis dalam mengetahui potensi PAD suatu daerah

yaitu kondisi awal suatu daerah, Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan PAD, Perkembangan PDRB Per Kapita Riil, Pertumbuhan Penduduk, Tingkat Inflasi, penyesuaian tarif, pembangunan baru, sumber pendapatan baru, dan perubahan peraturan.

Daya Pajak

Menurut Halim (2007) daya pajak (*tax effort*) adalah rasio antara penerimaan pajak dengan kapasitas atau kemampuan masyarakat dalam membayar pajak di suatu daerah. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan membayar masyarakat adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator kemampuan masyarakat daerah dalam membayar (*ability to pay*) pajak. Syahputra (2006) menyatakan bahwa nilai daya pajak berkisar antara 0 sampai 1, semakin besar nilai daya pajak menunjukkan semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam menjangkau potensi daerah melalui pajak, dengan kata lain rata-rata kontribusi pajak mempunyai perbandingan yang tinggi terhadap PDRB.

Hal ini dapat di hitung berdasarkan rumus:

$$\text{Tax ratio} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{PDRB}} \times 100\% \dots\dots\dots(1)$$

Sumber : Halim (2007)

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Dalam studi ini digunakan dua jenis variabel penelitian, yaitu variabel dependen atau variabel tak bebas (*dependent variable*) dan variabel independen atau variabel bebas (*independent variable*).

1. Variabel Dependen

Variabel Dependen merupakan variabel yang besarnya dipengaruhi oleh variabel lain. Pada penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah di 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah yang dinyatakan dalam satuan Rupiah.

2. Variabel Independen

a. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Dana perimbangan dalam penelitian ini adalah penerimaan Dana Perimbangan dalam Laporan Realisasi Anggaran tahun 2011-2017 pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil. Dana Perimbangan dinyatakan dalam satuan rupiah.

b. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

PDRB Perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah dibagi jumlah penduduk. PDRB dalam penelitian ini adalah PDRB 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah atas dasar harga konstan 2010 yang dinyatakan dalam satuan rupiah. Rumus perhitungan PDRB Perkapita adalah sebagai berikut:

$$\text{PDRB Perkapita} = \frac{\text{PDRB}}{\text{Jumlah Penduduk}} \dots\dots\dots(2)$$

c. *Tax Effort*

Tax Effort adalah rasio antara penerimaan pajak dengan kapasitas atau kemampuan masyarakat dalam membayar pajak di suatu daerah. Dalam penelitian ini menggunakan data realisasi pajak 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2017 dan indikator yang digunakan untuk mengetahui kemampuan membayar masyarakat adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2017. *Tax Effort* dinyatakan dalam persen.

d. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk adalah Keseluruhan penduduk yang tinggal dan tersebar dalam 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang dinyatakan dalam satuan jiwa.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu berupa data *time series* dan *cross section*. Data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Data *cross section* yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan rentang tahun 2011 sampai tahun 2017.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi dengan panel data yaitu kombinasi antar unit (*cross section*) dengan runtun waktu (*time series*). Model dijelaskan dalam persamaan sebagai berikut:

$$\text{LnPAD}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{LnDP}_{it} + \beta_2 \text{LnPDRBPK}_{it} + \beta_3 \text{LnTE}_{it} + \beta_4 \text{LnJP}_{it} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots (3)$$

Dimana:

- LnPAD_{it} = Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)
- LnDP = Dana Perimbangan (Rupiah)
- LnPDRBPK = PDRB Per Kapita (Rupiah)
- LnTE = *Tax Effort* (Persen)
- LnJP = Jumlah Penduduk (Jiwa)

β_0	=	Konstanta Regresi
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	=	Koefisien Regresi
i	=	<i>Cross section</i> (Kabupaten/Kota)
t	=	<i>Time series</i> (Tahun)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil estimasi model dengan menggunakan metode regresi data Panel adalah sebagai berikut:

$$PAD = -41.38138 + 1.179116 DP + 0.678224 PDRBPK + 0.355677 TE + 1.079359 LnJP$$

Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji statistik t menunjukkan seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen secara individual atau parsial dalam menerangkan variabel dependen. Hipotesis diterima apabila nilai koefisien memiliki arah yang sesuai dengan hipotesis dan memiliki tingkat signifikansi kurang dari $\alpha = 5\%$ (0,05).

Tabel 1 Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LnDP	1.179116	0.383916	3.071284	0.0024
LnPDRBPK	0.678224	0.279216	2.429034	0.0160
LnTE	0.355677	0.127146	2.797395	0.0056
LnJP	1.079359	0.758124	1.423723	0.1561
C	-41.38138	7.813168	-5.296363	0.0000

1. Variabel Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah karena t hitung sebesar 3.071284 (t hitung > t tabel) dan angka signifikansi dibawah 0,05.
2. Variabel PDRB Perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah karena t hitung sebesar 2.429034 (t hitung > t tabel) dan angka signifikansi dibawah 0,05.
3. Variabel *Tax Effort* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah karena t hitung sebesar 2.797395 (t hitung > t tabel) dan angka signifikansi dibawah 0,05.
4. Variabel Jumlah Penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah karena t hitung sebesar 1.423723 (t hitung > t tabel) dan angka signifikansi diatas 0,05.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F) dan Uji Koefisien Determinasi R^2

Pengujian terhadap pengaruh seluruh variabel independen dalam penelitian dapat dilakukan dengan uji statistik F. Uji statistik F menunjukkan apakah seluruh variabel independen dalam penelitian memiliki pengaruh secara bersama-sama

terhadap variabel dependen. Sedangkan, pengujian koefisien determinasi R^2 digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variansi variabel terikat, atau seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat yang ada.

Tabel 2 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F) dan Uji Koefisien Determinasi R^2

R-squared	0.957118
Adjusted R-squared	0.949091
S.E. of regression	0.137863
Sum squared resid	3.858285
Log likelihood	157.4014
F-statistic	119.2358
Prob(F-statistic)	0.000000
Prob(Wald F-statistic)	0.000000

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 1, nilai F hitung sebesar 119.2358 dengan signifikansi sebesar 0,000000. *Degree of freedom for numerator* = 3 (k-1) dan *degree of freedom for denominator* = 206 (n-k) sehingga diperoleh nilai F tabel sebesar 2.648863. nilai F hitung sebesar 119.2358 lebih besar daripada F tabel 2.648863 dengan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen dalam model secara simultan atau bersama-sama dapat mempengaruhi variabel dependen.

Tabel 1 juga menunjukkan hasil uji koefisien determinasi pada model regresi dalam penelitian. Nilai R-squared sebesar 0.957118 pada tabel mengandung arti bahwa 95,71% variabel Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan oleh variabel Dana Perimbangan, PDRB Per Kapita, *Tax Effort*, dan Jumlah Penduduk.

Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 1, diperoleh hasil bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah ini dikarenakan transfer dari pusat memang digunakan sebagaimana tujuan awal transfer diberikan. Dalam kasus Indonesia khususnya Provinsi Jawa Tengah, hal ini mengindikasikan bahwa dana transfer memang digunakan sesuai dengan tujuan awal dana perimbangan, yaitu sebagai dana untuk membiayai urusan-urusan daerah yang sebelum masa otonomi daerah merupakan urusan pemerintah pusat. Ketika transfer berfungsi dan digunakan sesuai dengan tujuannya, maka transfer akan berdampak baik pada perekonomian daerah tersebut sehingga pada akhirnya juga meningkatkan realisasi pajak suatu daerah.

Penelitian yang dilakukan Nikijuluw (2012) menunjukkan hasil yang sama dimana Dana Transfer memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap upaya

pemungutan pajak yang dimana secara tidak langsung akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh PDRB Per Kapita Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 1, diperoleh hasil bahwa PDRB Per Kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah kemungkinan disebabkan karena dengan meningkatnya pendapatan masyarakat akan meningkatkan *ability to pay* terhadap pajak daerah.

Penelitian yang dilakukan Adriani (2008) dan Santosa (2005) menunjukkan hasil yang sama dimana PDRB mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Tax Effort Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 1, diperoleh hasil bahwa *Tax Effort* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah disebabkan karena upaya pajak memiliki hubungan langsung dengan Pendapatan Asli Daerah, dimana pajak daerah merupakan sumber utama dan terbesar dari pendapatan asli daerah.

Penelitian yang dilakukan Fadhilah (2012) dan Shanza (2015) menunjukkan hasil yang sama dimana *Tax Effort* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah yang dimana secara tidak langsung akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 1, diperoleh hasil bahwa Jumlah Penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini mungkin disebabkan penduduk yang ada di Jawa Tengah kebanyakan masih berpenghasilan rendah dan masih ada yang acuh terhadap pajak. Penelitian yang dilakukan Adriani (2008) menunjukkan hasil yang sama dimana jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Jawa Tengah pada tahun 2011 sampai dengan 2017 dapat disimpulkan bahwa Variabel Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Jawa Tengah. Hal ini diduga karena pemerintah akan lebih memilih untuk menggunakan dana transfer untuk belanja daerah dibandingkan dengan menggunakannya sebagai substitusi atas pajak daerah. Sehingga dana transfer dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Variabel PDRB Per Kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan

dengan meningkatnya pendapatan masyarakat akan meningkatkan *ability to pay* terhadap pajak daerah yang secara tidak langsung akan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli daerah.

Variabel *Tax Effort* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan dengan meningkatnya daya pajak maka penerimaan dari pajak daerah juga akan meningkat. Sehingga Pendapatan Asli Daerah dapat meningkat pula.

Variabel Jumlah Penduduk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Jawa Tengah. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis dimana seharusnya jumlah penduduk menjadi objek pajak utama sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, E., & Handayani, S. I. (2008). Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.8 No.2*, 1-6.
- Asmuruf, M. F., Rumat, V. A., & Kawung, G. M. (2015). Pengaruh Pendapatan dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol. 15, No. 05*, 727-737.
- Fadhilah, W., & Sari, D. (2012). Analisis Potensi Penerimaan, Efektivitas dan Tax Effort Pajak Penerangan Jalan Serta Pengaruh Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Kota Bandung). *Proceedings Seminar Nasional Akuntansi dan Bisnis (SNAB)*, 892-903.
- Halim, A. (2007). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Bunga Rampai.
- Nikijuluw, R. (2012). Analisis Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat terhadap Upaya Pemungutan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 168-191.
- Porcelli, F. (2009). Fiscal Decentralization and Efficiency of Government: A Brief Literature Review.
- Santosa, P. B., & Retno, P. R. (2005). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri. *Jurnal Dinamika Pembangunan. Vol.2, No.1*, 9-18.
- Shah, A. (2006). A Practitioner's Guide to Intergovernmental Fiscal Transfers.
- Shanza, F. (2015). Analisis Potensi, Efektivitas Pemungutan dan Upaya Pajak (Tax Effort) Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2007-2013). *e-Proceeding of Management Vol.2 No.1*, 539-554.
- Syahputra, A. (2006). Perpajakan. USU Repository
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.